KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)BAPPEDA DIY Tahun 2013.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA DIY Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LAKIP BAPPEDA DIY Tahun 2013 dengan tenaga dan pikirannya diucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah panduan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, Maret 2014

Kepala

Tavip Agus Rayanto
NIP. 19641107 199103 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara No. 29 Tahun 2010 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Visi jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DIY yang tertuang dalam Rencana Strategis Instansi Tahun 2012-2017 adalah "**TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"**.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui tiga (3) misi, yaitu (a) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; (b) Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah; dan (c) Meningkatkan kualitas manajemen data.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA DIY merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja BAPPEDA DIY yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Utama Instansi Tahun 2012-2017 sebagaimana tertuang pada Renstra BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017. Indikator yang digunakan adalah indikator kinerja utama yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dari analisis terhadap lima (5) sasaran, terdapat lima (5) indikator kinerja sasaran yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2013 hasil analisis akuntabilitas kinerja BAPPEDA DIYtahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari lima indikator sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu:
   a. indikator sasaran strategis konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya sebesar 3% diatas target;
   b. indikator sasaran strategis meningkatkan aksesibilitas terhadap data sebesar 11,24% diatas target.
2. Sementara itu sebanyak tiga indikator yaitu Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat, Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat, Data perencanaan yang aktual dan valid tidak tercapai seperti dijelaskan berikut:

a. sasaran strategis keterpaduaan program deviasi yang terjadi sebesar 2,66% di atas target;
b. untuk sasaran strategis Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat deviasi yang terjadi sebesar 2,66% diatas target yang ditetapkan;
c. sedangkan untuk sasaran strategis data perencanaan yang aktual dan valid sebesar 1,61% dibawah target.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vii
DAFTAR GAMBAR ix
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Struktur Organisasi 2
I.3 Tugas dan Fungsi 3
I.4 Potensi 8
I.4.1 Susunan Kepegawaian 8
I.4.2 Keadaan Sarana dan Prasarana 12
I.4.3 Keuangan 15
I.5 Sistematika Lakip 16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 19
II.1 Perencanaan Strategis 19
II.1.1 Visi dan Misi 19
II.1.2 Tujuan Dan Sasaran 21
II.1.3 Strategi 23
II.1.4 Rencana Kegiatan (KINERJA) Tahunan (RKT) 27
II.2 Penetapan Kinerja 27
II.3 Rencana Anggaran 30
II.3.1 Target Belanja Bappeda DIY 30
II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 33
III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013 33
III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 35
III.2.1 Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkat 35
III.2.2 Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Meningkat 37

III.2.3 Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dengan Rencana yang Telah Disusun Sebelumnya 41
III.2.4 Sasaran Data Perencanaan yang Aktual dan Valid 52
III.2.5 Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Data 55
III.3 Akuntabilitas Anggaran 58
PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu BAPPEDA DIY 9
Tabel I-2 Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2013 12
Tabel II-1 Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi 22
Tabel II-2 Target capaian Sasaran Kinerja Bappeda 2012-2017..... 22
Tabel II-3 Rencana Kinerja Tahun 2013 27
Tabel II-4 Penetapan Kinerja Bappeda DIY Tahun 2013 28
Tabel II-5 Target Belanja Bappeda DIY Tahun 2013 31
Tabel II-6 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 31
Tabel III-1 Skala Nilai Peringkat Kinerja..... 33
Tabel III-2 Capaian Kinerja Tahun 2013 33
Tabel III-3 Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2013 35
Tabel III-4 Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2013 38
Tabel III-5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2013..... 42
Tabel III-6 Rincian Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2013 42
Tabel III-7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4 Tahun 2013..... 53
Tabel III-8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5 tahun 2013 56
Tabel III-9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013 .. 58

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Struktur Organisasi BAPPEDA DIY 3
Gambar I-2 Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin 8
Gambar I-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin 9
Gambar I-4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin 10
Gambar I-5 Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja 12
Gambar I-6 Halaman Login Sistem Informasi ROPK, Monev APBD, dan E-Sakip 14
Gambar I-7 Skema Pengembangan IT BAPPEDA DIY 15
Gambar I-8 Struktur Anggaran Yang Dikelola Bappeda DIY 2013 15
Gambar II-1 Trilateral Desk sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di Bappeda DIY 21
Gambar III-1 Musyawarah Rencana Pembangunan DIY Tahun 2013 37
Gambar III-2 Rapat Koordinasi Pengendalian “Mengoptimalkan Realisasi dan Kualitas Belanja Tahun 2013 51
Gambar III-3 Rapat Koordinasi Pengendalian “Mengoptimalkan Realisasi dan Kualitas Belanja Tahun 2013 52
Gambar III-4 Sistem Informasi Profil Daerah 54
Gambar III-5 Halaman Download Data/Informasi Perencanaan pada Website BAPPEDA DIY 56
Gambar III-6 Halaman Utama Sistem Informasi Profil Daerah 57

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang terintegrasi dan komprehensif dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja yang diperoleh, serta melakukan analisa terhadap tingkat pencapaian target yang direncanakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk penilaian kinerja yang diperoleh adalah dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), selain itu penyusunan LAKIP berfungsi sebagai pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja instansi yang telah direncanakan dan disepakati.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA DIY Tahun 2013 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan BAPPEDA DIY.

Dengan disusunnya LAKIP BAPPEDA DIY Tahun 2013 diharapkan dapat:

1. Mendorong BAPPEDA DIY didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik baik bagi instansi lain maupun pihak pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.

3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA DIY di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

I.2 Struktur Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari Peraturan Daerah tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang antara lain menyatakan bahwa Badan Perencana Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Program, Data dan Teknologi Informasi;
2. Bidang Pemerintahan, yang terdiri dari Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik dan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan;
3. Bidang Perekonomian, yang terdiri dari Sub Bidang Pertanian dan Kelautan dan Sub Bidang Dunia Usaha;
4. Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sub Bidang Pengembangan Kesejahteraan Rakyat;
5. Bidang Sarana dan Prasarana, yang terdiri dari Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral dan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
6. Bidang Pengendalian, yang terdiri dari Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Sub Bidang Kinerja Program;
7. Bidang Perencanaan dan Statistik, yang terdiri dari Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Statistik;
8. UPTLTD; serta

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat pada bagian lampiran.

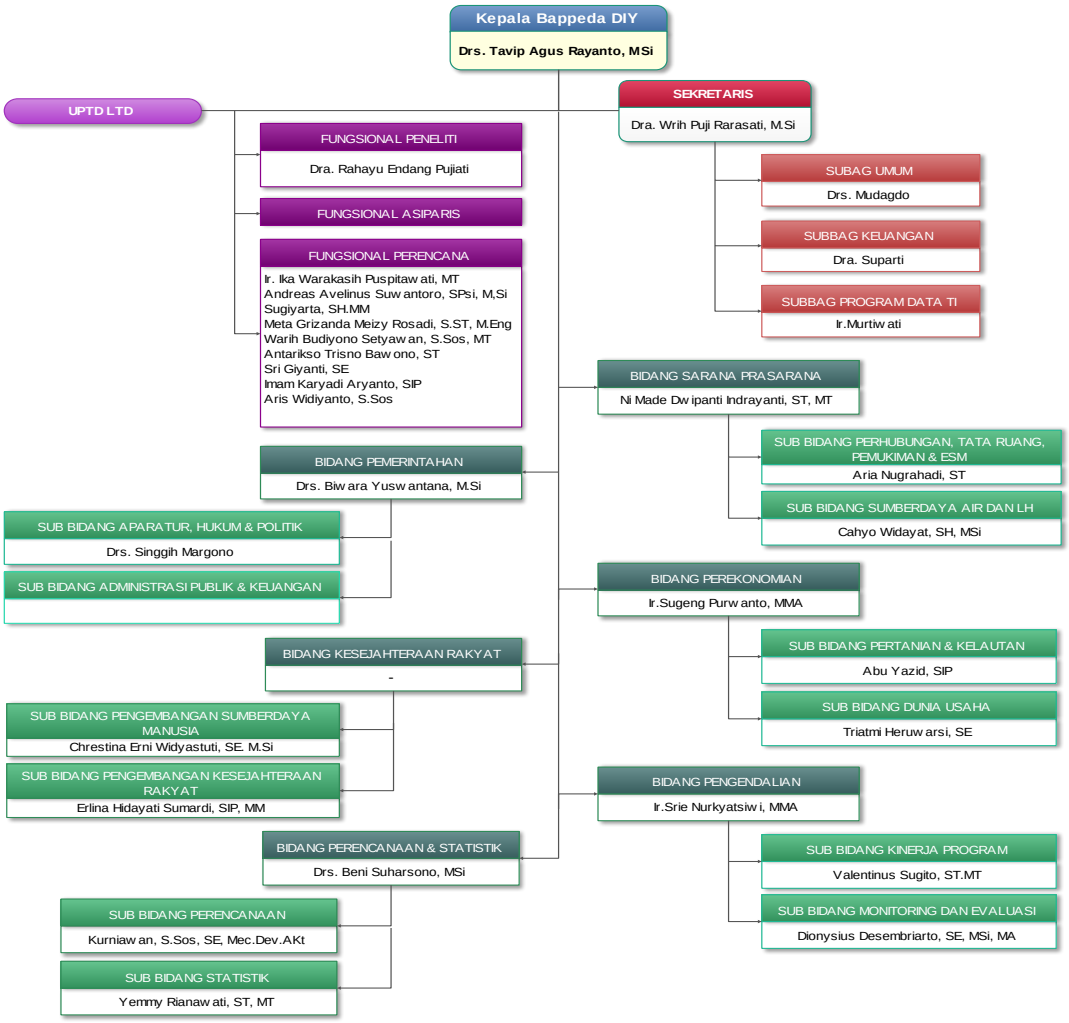

Gambar I-1
Struktur Organisasi BAPPEDA DIY

I.3 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan statistik dan pelayanan informasi perencanaan;
6. Penyiapan bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dan akhir masa jabatan Kepala Daerah serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, serta pengelolaan data dan sistem informasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Sekretariat;
2. Penyusunan program Badan;
3. Koordinasi dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Penyelenggaraan urusan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, serta efisiensi dan tatalaksana Badan;
5. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian Badan;
6. Pengelolaan keuangan dan barang Badan;
7. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
8. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program Badan;
9. Fasilitasi pengembangan kerjasama teknis
10. Evaluasi dan penyusunan laporan Badan;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemerintahan bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Pemerintahan;

2. Penyiapan program di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang aparatur, hukum dan politik serta bidang administrasi publik dan keuangan;
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pemerintahan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Perekonomian;
2. Penyiapan program di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM) serta pariwisata;
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perekonomian;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip,

kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
2. Penyiapan program di pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, perpustakaan dan arsip, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial serta kesehatan;
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesejahteraan Rakyat;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Sarana dan Prasarana;
2. Penyiapan program di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
3. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;

4. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi, tata ruang, permukiman, energi sumberdaya mineral, sumberdaya air dan lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan RAPBD;
6. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Sarana dan Prasarana;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Pengendalian;
2. Pengumpulan dan penyusunan data perencanaan serta hasil pelaksanaan program pembangunan daerah;
3. Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah;
4. Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah;
5. Penyiapan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah;
6. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program pembangunan daerah;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pengendalian;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengembangan statistik Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Statistik mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
2. Perumusan program pembangunan daerah;
3. Pemberian dukungan, pengembangan dan penyelenggaraan statistik daerah;
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Perencanaan dan Statistik;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

I.4 Potensi

I.4.1 Susunan Kepegawaian

I.4.1.1 Kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan, tingkat pendidikan, jenis kelamin

Faktor ***sumberdaya*** manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumberdaya manusia yang ada di dalamnya.

Sampai dengan Desember 2013, pegawai BAPPEDA DIY tercatat sebanyak 113 orang, yang jika dikelompokkan berdasarkan posisi jabatan, golongan dan pendidikan adalah sebagai berikut:

a) Pejabat Struktural

Pejabat struktural di Bappeda DIY Eselon III terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki, sedangkan Eselon IV terdiri dari 6 orang perempuan dan 8 orang laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keadilan dan kesetaraan gender dalam penentuan pengambilan kebijakan di Bappeda. Jumlah pejabat struktural di BAPPEDA DIY dijelaskan pada gambar I.2 berikut::

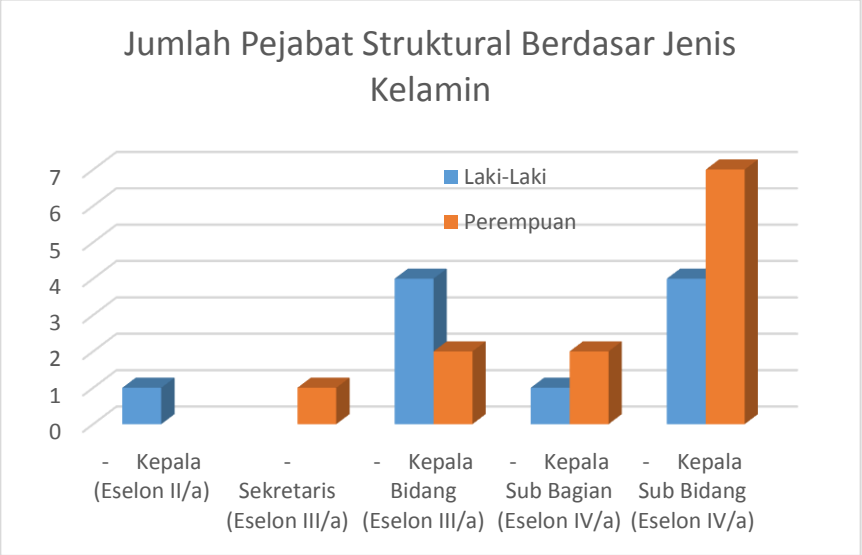

Gambar I-2
Jumlah Pejabat Struktural Berdarkan Jenis Kelamin

b) Pejabat Fungsional Tertentu

Pejabat fungsional peneliti berdasarkan analisis kebutuhan (Pergub No. 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) di Bappeda dibutuhkan 2 orang fungsional peneliti dan 25 orang fungsional perencana serta 1 orang arsiparis. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kekurangan pejabat fungsional di Bappeda.

Tabel I-1
Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu BAPPEDA DIY

Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
- **Pejabat Fungsional Peneliti**	0	1	1 orang
- **Pejabat Fungsional Perencana**	6	3	9 orang
- **Pejabat Fungsional Arsiparis**	0	0	0 orang

c) Golongan

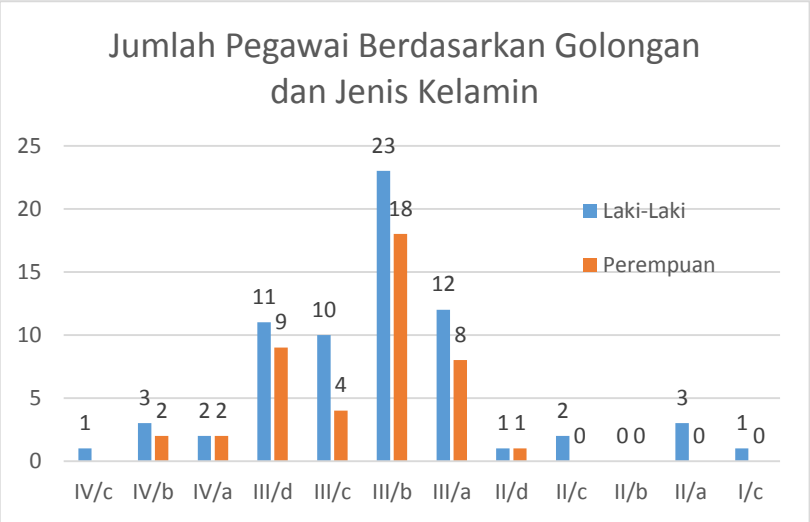

Gambar I-3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dan Jenis Kelamin

d) Pendidikan (grafik pie chart)

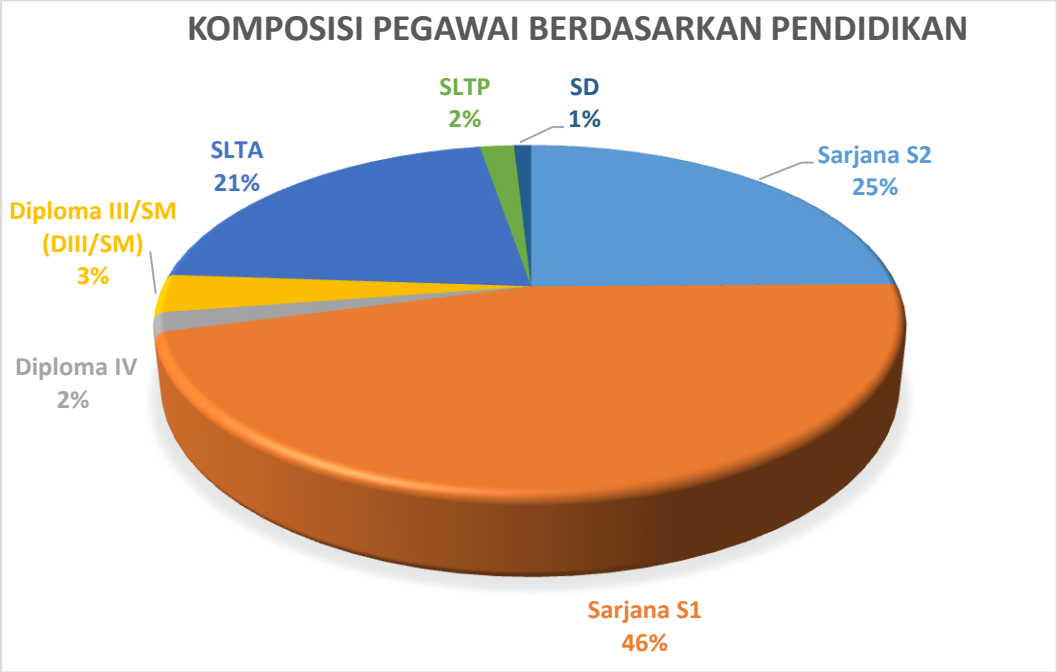

Gambar I-4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi personalia BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 (52 orang atau 45,6%), kemudian diikuti oleh pendidikan S2 (28 orang atau 24,6%), dan SLTA (24 orang atau 21,1%). Dengan demikian berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi personalia BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta kurang memadai dalam segi kuantitas, namun dalam segi kualitas jumlah personil di BAPPEDA sudah memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

I.4.1.2 Jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban pekerjaan

Kebutuhan pegawai berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Untuk jabatan struktural kebutuhan pegawai sebanyak 23 saat ini jumlah jabatan terisi sebanyak 21, pada akhir tahun 2013 ada 2 personil yang memangku jabatan struktural yang dipromosikan menduduki jabatan di lain SKPD yaitu

kepala Bidang Kesejahteraan rakyat dipromosikan menjadi Kepala Biro Organisasi Setda DIY dan kepala Sub Bidang Administrasi Publik & Keuangan Bidang Pemerintahan BAPPED DIY dipromosikan menduduki jabatan eselon tiga di Dinas Tenaga Kerja DIY;

2. Untuk jabatan fungsional umum kebutuhan pegawai sebanyak 113 akan tetapi sampai saat ini baru terisi sebanyak 82, untuk mencukupi kebutuhan pegawai tiap tahun BAPPEDA DIY mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekrutmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahab;
3. Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan personil BAPPEDA DIY seharusnya memiliki 28 personil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan rincian 2 personil untuk jabatan fungsional peneliti, 25 personil untuk jabatan fungsional perencana, dan 1 orang fungsional arsiparis. Saat ini Bappeda baru memiliki 1 orang yang menduduki jabatan fungsional peneliti dan 9 orang pada jabatan fungsional perencana. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional perencana BAPPEDA DIY telah mengirimkan personil pada diklat yang dibutuhkan.

Formasi kebutuhan pegawai BAPPEDA DIY sesuai dengan Pergub No. 37 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seperti dijelaskan pada gambar 1.5 berikut:

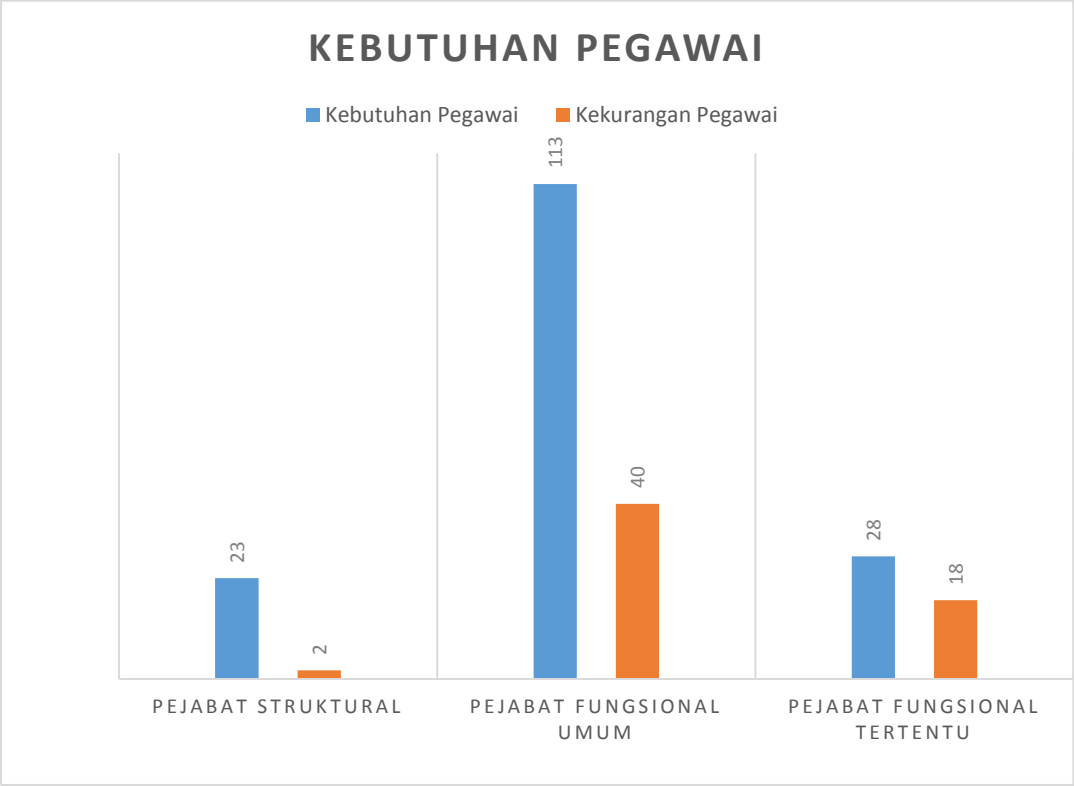

Gambar I-5
Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

I.4.2 Keadaan Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di BAPPEDA DIY sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Aset berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel I-2
JumlahAset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA DIY Tahun 2013

Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan
Kendaraan roda 4	12 buah	Baik
Kendaraan roda 2	17 buah	Baik
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2.402 buah	Baik
Alat Studio dan komunikasi	180 buah	Baik
Buku Perpustakaan	3.052 buah	Baik

Sumber: BAPPEDA DIY, Tahun 2013

Peralatan komputer sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPEDA DIY sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Local Area Network* (LAN) baik tersambung dengan media Kabel UTP maupun WiFi. Dan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (SKPD) BAPPEDA DIY membangun beberapa sistem informasi antara lain:

1. Sistem Informasi Perencanaan (http://jogjaplan.com) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah, sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih reintegrasi, transparan dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS;
2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK), sistem informasi Monev berfungsi untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatannya, sedangkan disisi BAPPEDA DIY agar fungsi pengendalian dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan PEMDA DIY dapat lebih mudah dilakukan dengan menganut asas transparansi dan akuntabilitas;
3. Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDSD), Sistem Informasi MDSD berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemda DIY secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;
4. Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), berfungsi sebagai media menyampaikan informasi data tabular tentang profil daerah. SIPD memiliki 2760 elemen data yang terbagi ke dalam delapan kelompok data dan tiga puluh dua jenis data;
5. Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR), SIPR berfungsi sebagai alat bantu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) di dalam menjalankan tugasnya yaitu memaduserasikan (mengkoordinasikan) penataan ruang provinsi dengan kabupaten/kota;

Untuk menunjang kapasitas layanan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan saat ini BAPPEDA DIY telah memiliki 1 buah server

yang memuat database website BAPPEDA DIY, serta 2 buah server lainnya yang memuat database Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah, serta Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR), Keempat aplikasi Sistem Informasi tersebut dapat diakses melalui website BAPPEDA DIY. Satu buah server dipakai sebagai *router.* Infrastruktur penunjang lainnya terkait layanan informasi BAPPEDA memiliki bandwith sebesar 10 Mbps yang terdiri dari dua ISP masing-masing sebesar 4 Mbps dan 6 Mbps.

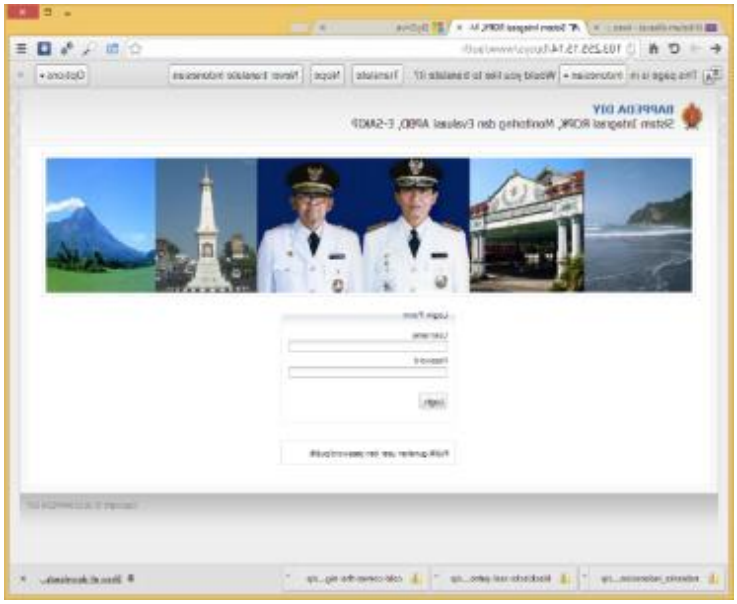

Gambar I-6
Halaman Login Sistem Informasi ROPK, Monev APBD, dan E-Sakip

BAPPEDA DIY selalu berupaya untuk meningkatkan kapasitas layanan dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk menunjang tugas pokok dan fungsi. Secara skematik arah pengembangan Teknologi Informasi yang akan dikembangkan BAPPEDA DIY seperti dijelaskan pada gambar I.7 berikut:

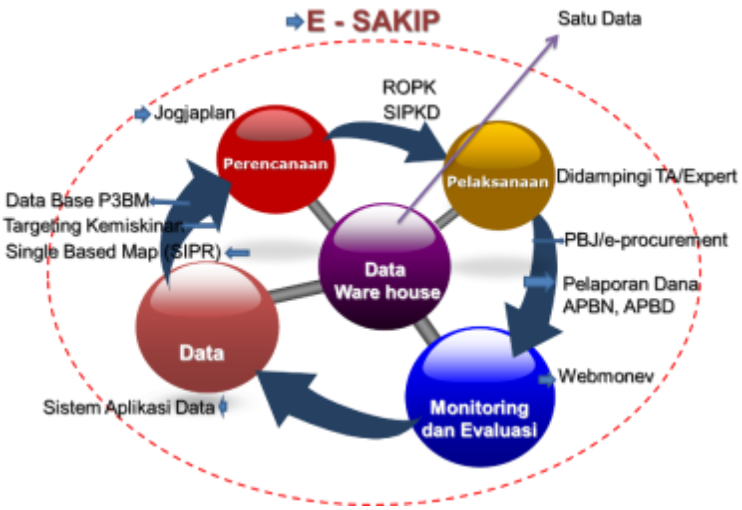

Gambar I-7
Skema Pengembangan IT BAPPEDA DIY

I.4.3 Keuangan

Dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas BAPPEDA DIY sebagian besar berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didukung oleh anggaran dari dana Keistimewaan, serta APBN dijelaskan pada gambar berikut I.8 berikut:

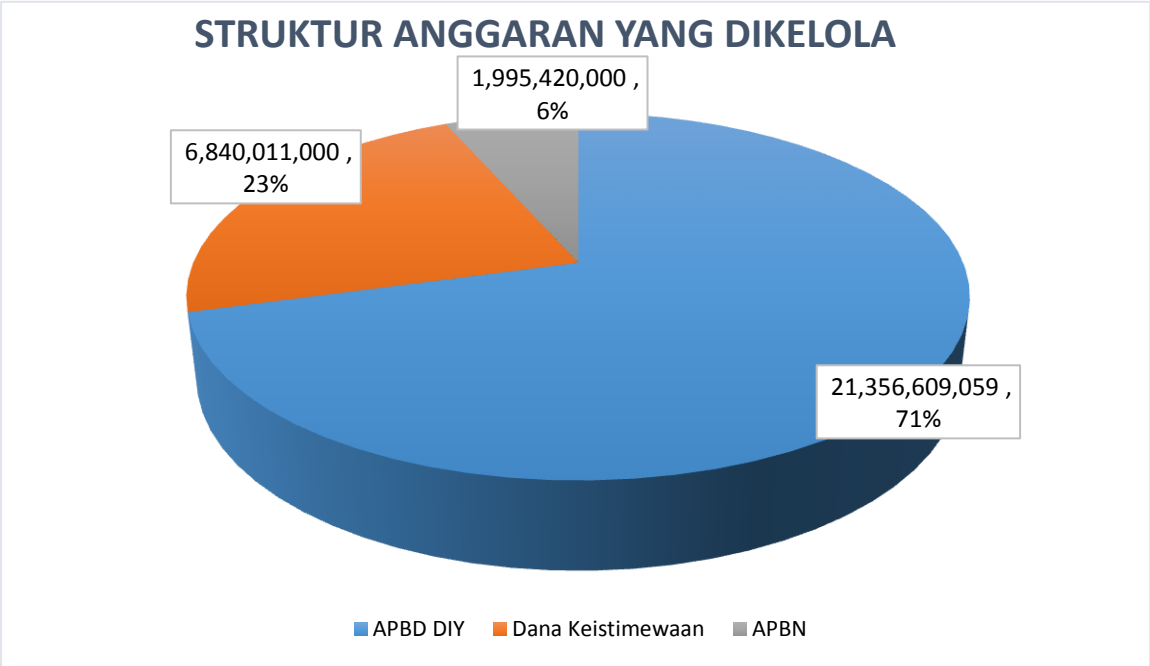

Gambar I-8
Struktur Anggaran Yang Dikelola Bappeda DIY 2013

Rincian anggaran yang dikelola BAPPEDA DIY adalah APBD 2013 sebesar Rp 28.196.620.059,- (71%), Dana Keistimewaan sebesar Rp 6.840.011.000,- (23%) dan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp 1.995.490.000,- yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp 1.075.000.000,- dan BAPPENAS sebesar Rp 920.490.000,-.

I.5 Sistematika Lakip

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA DIY tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LAKIP/Manfaat LAKIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi BAPPEDA DIY, Potensi yang menjadi ruang lingkup SKPD, dan Sistematika penulisan LAKIP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis

pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN:

1. Pengukuran Kinerja
2. Penetapan Kinerja
3. Struktur Organisasi

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis

Penetapan visi dan misi menjadi salah satu komponen penting di dalam usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan khususnya pada institusi BAPPEDA DIY. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Permen PAN-RB No. 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja.

Visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan BAPPEDA DIY. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

II.1.1 Visi dan Misi

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY yaitu merupakan unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam hal ini perencanaan program pembangunan daerah yang sudah tertuang didalam RPJMD 2012 -2017.

Visi yang dituangkan dalam Renstra BAPPEDA 2012-2017 adalah sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS"

Makna dari visi di atas adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA DIY harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi,dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral.

Selain menjadi suatu institusi perencanaan yang handal, BAPPEDA DIY harus menjalankan fungsi pengendalian yang kredibel agar perencanaan pembangunan yang sudah disusun dapat diwujudkan sesuai dengan target – target yang sudah ditetapkan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA DIY melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAPPEDA DIY secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Guna mewujudkan visi BAPPEDA DIY 2012-2017 di atas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab institusi. Selanjutnya misi BAPPEDA DIY dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas manajemen data.

Misi 1, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang benar-benar berkualitas serta dapat diimplementasikan oleh SKPD teknis. Oleh karena itu untuk mewujudkan perencanaan yang berkualitas diperlukan koordinasi, sinergi, dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi dan pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi 2, dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, selain koordinasi juga diperlukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah sehingga dapat diketahui apakah proses pembangunan yang berjalan telah sesuai dengan yang direncanakan dan hasilnya dapat dievaluasi untuk menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan yang akan datang.

Misi 3, untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik, diperlukan pengelolaan data yang baik dengan memastikan data tersebut valid/akurat, *up to date*, aktual, tersedia dan mudah diakses. Oleh karenanya kualitas manajemen data sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan maupun hasil perencanaan itu sendiri.

Gambar II-1
Trilateral Desk sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di Bappeda DIY

II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

II.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel II-1 berikut:

Tabel II-1
Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai misi

NO	Misi	Tujuan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan dan meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah
2.	Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi
3.	Meningkatkan kualitas manajemen data	Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan serta meningkatkan informasi yang dapat diakses masyarakat

II.1.2.2 Sasaran

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel II-2 berikut:

Tabel II-2
Target capaian Sasaran Kinerja Bappeda 2012-2017

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2013	Target Akhir 2017
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	%	24,16	11,15

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal 2013	Target Akhir 2017
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana	%	24,16	11,15
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Peresentase Capaian Sasaran Tahunan terhadap Taget Sasaran RPJMD	%	74,00	100
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	%	94,00	100
5.	Meningkat-kan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	%	60,00	100

II.1.3 Strategi

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang harus dilakukan meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi 1

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi pertama strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan melalui trilateral desk;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem aplikasi jogjaplan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang yang diambil untuk dalam melaksanakan strategi adalah pengarusutamaan sistem informasi perencanaan terpadu.

C. Program kegiatan

Program dan kegiatan dari masing-masing urusan dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan Misi 1 adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:
   a. Penyusunan Rancangan RKPD;

b. Penyusunan KUA dan PPAS;
c. Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan;
d. Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan;
e. Review RPJPD;
f. Evaluasi Musrenbang Regional Jawa-Bali.

2. Programperencanaan Pembangunan Ekonomi
   a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
   b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha;
   c. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;
   d. Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha.
3. Program Perencanaan Sosial Budaya
   a. Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan;
   b. Koordinasi Sub Bidang Pengembangan SDM;
   c. Koordinasi Sub Bidang Pengembangan Kesra;
   d. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM;
   e. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra;
   f. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs
4. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana
   a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan. Tata Ruang. Permukiman dan ESDM;
   b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM;
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;
   e. Pembinaan Penataan Ruang Daerah;
   f. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan;

g. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – APBD

5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
   a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum dan Politik;
   b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan;
   c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur. Hukum dan Politik;
   d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan
   e. Fasilitasi dan Koordinais Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di Provinsi DIY;
   f. Perencanaan Penanganan Bencana;
   g. Fasilitasi Pemberantasan Korupsi.

II.1.3.2 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi 2

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi kedua strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan rekomendasi monitoring evaluasi dan penyamaan persepsi mekanisme perencanaan dengan legislatif ;
2. Mengintegrasikan monitoring dan evaluasi sistem perencanaan.

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi kedua adalah: Meningkatkan akuntablitas melalui sistem pengendalian terpadu Program kegiatan.

C. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran misi kedua adalah Program Pengendalian Pembangunan Daerah, dengan kegiatan:

1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ;
3. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah;
4. Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY;
6. Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah;
7. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
9. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

II.1.3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Misi 3

A. Strategi

Di dalam usaha mencapai misi ketiga strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. mengintegrasikan data dalam bentuk satu data pembangunan;
2. memperkuat sistem informasi data terapadu

B. Kebijakan

Kebijakan yang diarahkan untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah: Membangun sistem satu data pembangunan

C. Program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran misi ketiga adalah sebagai berikut:

A. Program Pengembangan Statistik Daerah, dengan kegiatan:
   a. Pengolahan. Analisis. Monitoring. dan Evaluasi Data Statistik Daerah;
   b. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.

B. Programpengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:
   a. Pengembangan Website;

b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pengembangan Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah;
d. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
e. Pengembangan Sistem Informasi Profile Daerah;
f. Penyusunan Profil BAPPEDA;
g. Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah.

II.1.4 Rencana Kegiatan (KINERJA) Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan BAPPEDA DIY menetapkan indikator sasaran serta target capaian sasaran indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2013 BAPPEDA merencanakan target kinerja tahun 2013 seperti dijelaskan pada tabel II.3 berikut:

Tabel II-3
Rencana Kinerja Tahun 2013

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	24,16 %
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana	24,16 %
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	74 %
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	94 %
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	60 %

II.2 Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan Kinerja / Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, indikator Kinerja Utama, beserta target kinerja dan Anggaran.

Dalam penyusunan penetepan kinerja instansi mengacu pada renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPS. Penetapan Kinerja Bappeda DIY tahun 2013 ditunjukkan pada tabel II-4 berikut:

Tabel II-4
Penetapan Kinerja Bappeda DIY Tahun 2013

No	SASARAN	INDIKATOR	Target %	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	24.16	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.193.915.600.-**
				a .Penyusunan Rancangan RKPD	472.699.200.-
				b.Penyusunan KUA dan PPAS	161.970.000.-
				c.Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan	123.209.450.-
				d.Sinkronisasi dan Koordinasi Program Pembangunan	180.050.000.-
				e.Review RPJPD	78.302.200.-
				f.Evaluasi Musrenbang Regional Jawa-Bali	177.684.750.-
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan. perkonomian. kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana	24.16	**PROGRAMPERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI**	**848.749.400.-**
				a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;	290.080.000.-
				b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha;	290.080.000.-
				c. Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan;	259.930.000.-
				d. Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha.	148.769.400.-
				PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	**1.181.841.500,-**
				a. Koordinasi Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan;	188.047.750.-
				b. Koordinasi Sub Bidang Pengembangan SDM;	147.789.900.-
				c. Koordinasi Sub Bidang Pengembangan Kesra;	98.488.900.-
				d. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM;	336.933.850.-
				e. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra;	322.178.350.-
				f. Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs	88.402.750.-
				PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SARANA PRASARANA	**1.389.811.590.-**
				a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan. Tata Ruang. Permukiman dan ESDM;	438.057.750.
				b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup	296.910.000.-
				c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan. Tata Ruang. Permukiman. dan ESDM;	149.740.000.-

No	SASARAN	INDIKATOR	Target %	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp
				d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup;	100.000.000.-
				e. Pembinaan Penataan Ruang Daerah;	148.752.000.-
				f. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – Loan;	147.961.840.-
				g. Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) – APBD	108.390.000.-
				PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN	**1.206.240.650,-**
				a. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur. Hukum. dan Politik;	303.650.000.-
				b. Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan;	295.880.650.-
				c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur. Hukum dan Politik;	99.455.000.-
				d. Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan	92.800.000.-
				e. Fasilitasi dan Koordinais Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (Labkurtannas) di Provinsi DIY;	99.982.000.-
				f. Perencanaan Penanganan Bencana;	98.500.000.-
				g. Fasilitasi Pemberantasan Korupsi.	215.973.000,-
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	74	**PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.439.699.915.-**
				a. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;	149.859.910.-
				b. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ;	334.984.920.-
				c. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah;	299.723.100.-
				d. Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa;	77.733.700.-
				e. Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY;	197.323.075.-
				f. Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah;	43.350.110.-
				g. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	143.029.500.-
				h. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);	64.820.000.-
				i. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat.	128.875.600.-
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	94	**PROGRAM PENGEMBANGAN STATISTIK DAERAH**	**1.429.100.000.-**
				a. Pengolahan. Analisis. Monitoring. dan Evaluasi Data Statistik Daerah;	974.382.000.-

No	SASARAN	INDIKATOR	Target %	Program/ Kegiatan	Anggaran Rp
				b. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah.	454.718.000.-
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	60	**PROGRAMPENGEMBANGAN DATA/INFORMASI**	**905.080.500.-**
				a. Pengembangan Website;	59.134.000.-
				b. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;	224.580.400.-
				c. Pengembangan Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah;	70.134.900.-
				d. Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah;	154.071.400.-
				e. Pengembangan Sistem Informasi Profile Daerah;	304.004.000.-
				f. Penyusunan Profil BAPPEDA;	49.103.500.-
				g. Ekspose Perencanaan Pembangunan Daerah.	44.052.300.-

II.3 Rencana Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2013 Bappeda DIY melaksanakan kegiatan APBD sebesar Rp 20.103.692.141,- dengan rincianBelanja Langsung sebesar Rp 14.676.886.855.- dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.426.805.286. Melalui mekanisme perubahan APBD 2013 menjadi Rp 21.356.609.059.- dengan rincian Belanja langsung Rp 15.774.426.785.- dan Belanja Tidak Langsung Rp 5.582.182.274.-, pada Bulan Nopember mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan sebesar Rp 6.840.011.000.- dengan rincian Belanja tidak langsung Rp 0.- dan belanja langsung Rp 6.840.011.000. sehingga total Anggaran yang dikelola BAPPEDA DIY tahun 2013 sebesar Rp 28.196.620.059,-.

Total Realisasi APBD tahun 2013 setelah perubahan sebesar Rp 22.665.586.630.- (80,38%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 5.571.603.075.- (26.10%) belanja langsung sebesar Rp 17.093.983.555.- (66.33%). Untuk realisasi dana Keistimewaan tahun 2013 sebesar Rp 2.928.970.640.- dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp 0.- (0%) dan belanja langsung sebesar Rp 2.928.970.640.- (100%).

II.3.1 Target Belanja Bappeda DIY

Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan BAPPEDA DIY menetapkan target belanja sebesar Rp 28.196.620.059,- dengan rincian

Belanja Tidak Langsung sebesar RP 5.582.182.274,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 22.614.437.785,- . Belanja Langsung yang dikelola terdiri dari APBD sebesar Rp 15.774.426.785,- dan dana Keistimewaan sebesar Rp 6.840.011.000,-.

Tabel II-5
Target Belanja Bappeda DIY Tahun 2013

Uraian	Target	Persentase
Belanja Tidak Langsung	Rp 5.582.182.274.-	19,79%
Belanja Langsung	Rp 22.614.437.785.-	80,21%
Jumlah	Rp 28.196.620.059.-	100 %

II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Alokasi anggaran per sasaran strategis yang dikelola BAPPEDA DIY mengalami perbedaan dengan Penetapan Kinerja dikarenakan seiring dengan berjalannya pelaksanaan program/kegiatan terdapat optimalisasi serta kebutuhan yang mendesak, terdapat penambahan anggaran baik melalui kegiatan yang sudah ada maupun penambahan kegiatan baru.

Anggaran belanja langsung Tahun 2013 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Bappeda seperti dijelaskan pada tabel II.6 berikut:

Tabel II-6
Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	Sasaran	Anggaran	Persentase	Keterangan
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	Rp 2.181.846.900.-	**10**	
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Rp 10.562.502.190.-	**45**	
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Rp 2.305.359.515.-	**8**	
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Rp 1.426.177.380.-	**6.8**	
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Rp 931.930.500.-	**4**	

Tabel II.6 menunjukkan jumlah Anggaran yang dikelola BAPPEDA DIY untuk pencapaian sasaran strategis yang terdiri dari dari APBD ditambah dana keistimewaan tahun 2013. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran ke-satu terdiri dari anggaran APBD sebesar Rp 1.572.003.900.-dan dana keistimewaan sebesar Rp 609.843.000.-;
2. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran ke-dua terdiri dari APBD sebesar Rp 4.939.115.190.- dan dana keistimewaan sebesar Rp 5.623.387.000.-;
3. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran ke-tiga APBD sebesar Rp 1.698.578.515.- dan dana keistimewaan sebesar Rp 606.781.000.-;
4. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran ke-empat APBD sebesar Rp 1.426.177.380.-;
5. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk mencapai sasaran ke-lima APBD sebesar Rp 931.930.500.-;
6. Belanja langsung pendukung APBD sebesar Rp 5.206.621.300.-.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Tahun 2013

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Tahun 2013 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel III-1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Interval Nilai realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91≤ 100	Sangat Baik	
2.	76 ≤ 90	Tinggi	
3.	66 ≤ 75	Sedang	
4.	51 ≤ 65	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BAPPEDA beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel III.2 berikut:

Tabel III-2
Capaian Kinerja Tahun 2013

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1.	Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan	%	24,16	26,82	88,99	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
		realisasi tahunan					
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan. perkonomian. kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana	**%**	24,16	26,82	88,99	
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	**%**	74	77	104	
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia	**%**	94	92,39	98	
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	**%**	60	71,24	118.73	

Dari tabel III.2 di atas terdapat lima sasaran strategis yang terbagi ke dalam lima indikator sasaran strategis. Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja dengan klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2010 yaitu:
   a. Indikator kinerja sasaran strategis Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya sebesar 3% diatas target;
   b. indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan aksesibilitas terhadap data sebesar 11,24 % diatas target.
2. Capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan klasifikasi tinggi adalah:
   a. Indikator kinerja Sasaran strategis keterpaduan program deviasi yang terjadi sebesar 2,66 % di atas target;
   b. untuk sasaran Strategis Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat deviasi yang terjadi sebesar 2,66% diatas target yang ditetapkan;
   c. sedangkan untuk sasaran strategis data perencanaan yang aktual dan valid sebesar 1,61 % dibawah target.

Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase kelengkapan data perencanaan yang

tersedia sebesar 118,73%. Sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana sebesar 88,99%.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis BAPPEDA DIY dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut sasaran stategis diuraikan sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan Meningkat

Tolok ukur capaian indikator kinerja sasaran 1 (Keterpaduan Program/Kegiatan Pembangunan meningkat) mempunyai satu indikator yaitu Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan.

Tabel III-3
Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-1 Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan	28,19 %	24.16 %	26,82 %	88,99%	11,15%	41,57 %

❖ Capaian 2012 sesuai data dasar RPJMD DIY 2012-2017

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

"Target indikator kinerja RPJMD tahun (N) yang tidak tercapai/total jumlah indikator RPJMD tahun 2012-2017X100%"

Realisasi capaian indikator kinerja sasaran ke-1 tahun 2013 sebesar 26,82% itu berarti target capaian kinerja sasaran tidak tercapai karena deviasi

capaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 masih diatas target yaitu sebesar 2,66%. Jika dibandingkan pada tahun 2012 untuk tahun 2013 deviasi capaian target indikator kinerja sasaran yang yang tidak tercapai mengalami penurunan sebesar 1,37%.

III.2.1.1 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.
3. Hasil musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karenatingkat keterwakilan masyarakat masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak sinkronan perencanaan pembangunan
5. Belum optimalnya fungsi dan peran fungsional perencana dan peneliti di Bappeda.

B. Solusi

1. Sub Bidang Perencanaan perlu mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta mengintegrasikan proses politik sejak awal dan menyinkronkan waktu reses DPRD dengan tatakala waktu perencanaan dan penganggaran.
2. Sub Bidang Statistik perlu meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan.

3. Sub Bidang Perencanaan perlu meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan stakeholders dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
4. Sub Bidang Perencanaan perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur tentang tatacara koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan musrenbang daerah.
5. Meningkatkan peran dan fungsi pejabat fungsional perencana dan peneliti dalam proses perencanaan.

Gambar III-1
Musyawarah Rencana Pembangunan DIY Tahun 2013

III.2.2 Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan Meningkat

Tolok ukur capaian sasaran 2 (Integrasi Program Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan meningkat) mempunyai satu indikator yaitu Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana. Capaian indikator kinerja sasaran untuk sasaran ke 2 seperti dijelaskan pada tabel III.4 berikut:

Tabel III-4
Capaian indikator Kinerja Sasaran ke-2 Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sarana prasarana	28,19 %	24,16 %	26,82 %	88,99%	11,15%	41.58%

Indikator kedua ini terdiri dari indikator program sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan	1,34 %	1,15 %	12,73 %	9,04%	0,53%	4.16%
2.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian	6,71 %	5,57%	3,64 %	136,70%	2,65 %	72,80%
3.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Kesejahteraan Rakyat	17,45 %	14,96 %	6,82 %	154,41%	6,90 %	101,17%

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana Prasarana	2,68 %	2,3 %	3,64 %	41,74%	1,06 %	29.12%

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

"Target indikator kinerja RPJMD bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana tahun (N) yang tidak tercapai/total jumlah indikator RPJMD tahun 2012-2017 bidang pemerintahan, perkonomian, kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana X100%"

Dari hasil perhitungan didapatkan realisai capaian indikator kinerja sasaran tahun 2013 yang tercapai adalah Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat. Hal tersebut ditunjukkan dengan besar deviasi yang ditunjukkan oleh capaian kinerja oleh Bidang Perekonomian sebesar 8,14% dibawah target, untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat sebesar 1,93% dibawah target, sedangkan untuk bidang Pemerintahan target capaian kinerja sasaran tidak tercapai yaitu deviasi masih di atas target sebesar 11,58% dan untuk Bidang sarana Prasarana sebesar 1,34%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2012 untuk bidang Pemerintahan deviasi capaian kinerja sasaran mengalami kenaikan sebesar 11,39%, untuk Bidang Perekonomian mengalami penurunan sebesar 3,07%, untuk bidang Kesejahteraan Rakyat mengalami penurunan sebesar 10,63%, dan untuk bidang Sarana Prasarana Mengalami Kenaikan sebesar 0,96%.

III.2.2.1 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Indikator ini dihitung berdasarkan capaian indikator pada setiap sektor yang merupakan indikator kinerja SKPD pengampu sektor. Target belum bisa tercapai disebabkan beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran baik bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, Pemerintahan maupun bidang sarana prasarana.
2. Data dan informasi yang tersedia belum sepenuhnya bisa digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan baik bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat, Pemerintahan maupun bidang sarana prasarana.
3. Hasil Musrenbang belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi masyarakat karenatingkat keterwakilan masyarakat dan pihak terkait lainnya masih rendah serta masih kuatnya ego sektoral dari masing-masing SKPD.
4. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak sinkronan perencanaan pembangunan baik bidang ekonomi, kesra, pemerintahan maupun sarpras.
5. Belum sinkronnya indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD dengan indikator kinerja di SKPD sehingga menimbulkan kesenjangan capaian kinerja.
6. Belum optimalnya fungsi dan peran fungsional perencana dan peneliti di Bappeda dalam proses perencanaan.

B. Solusi

1. Bidang-bidang perencanaan (Ekonomi, Kesra, Pemerintahan, Sarpras) perlu mengoptimalkan fungsi perencanaan program

dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta mengintegrasikan proses politik sejak awal dan mensinkronkan waktu reses DPRD dengan tatakala waktu perencanaan dan penganggaran di semua bidang/sektor.

2. Sub Bidang Statistik perlu meningkatkan koordinasi dan pengelolaan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas dan terkini (up to date) sebagai bahan perencanaan di semua bidang/sektor.
3. Bidang-bidang perencanaan (Ekonomi, Kesra, Pemerintahan, dan Sarpras) perlu meningkatkan keterlibatan dan keterwakilan stakeholders termasuk pendampingan tenaga ahli dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan di semua bidang/sektor .
4. Bidang-bidang perencanaan (Ekonomi, Kesra, Pemerintahan, Sarpras) perlu meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.
5. Bidang-bidang perencanaan (Ekonomi, Kesra, Pemerintahan, Sarpras) perlu menelaah dan mensinkronkan antara indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD dengan indikator kinerja SKPD yang menjadi tolok ukur capaian indikator.
6. Meningkatkan peran dan fungsi pejabat fungsional perencana dan peneliti dalam proses perencanaan semua bidang/sektor.

III.2.3 Sasaran Konsistensi Antara Program Kegiatan yang Telah Dilaksanakan dengan Rencana yang Telah Disusun Sebelumnya

Tolok ukur capaian sasaran 3 (Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya) mempunyai satu indikator yaitu Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD. Capaian indikator kinerja untuk sasaran 3 seperti dijelaskan pada tabel III.5 berikut:

Tabel III-5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
	Persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD	0	74%	77%	104%	100%	77

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

"Jumlah capaian indikator sasaran RPJMD tahun 2012-2017 tahun N/Jumlah indikator sasaran RPJMD tahun 2012-2017 x 100%"

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan salah satu indikator yang digunakan adalah menghitung prosentase capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Indikator Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD terdiri dari 17 indikator. Realisasi capaian indikator ketiga mencapai 77,30% sudah melebeihi target tahun 2014 yaitu 74%. Namun demikian ada 7 indikator yang tidak dapat memenuhi target 100%, yaitu rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita pertahun (ADHK), Indek ketimpangan antar wilayah, indeks ketimpangan pendapatan, lama tinggal wisatawan nusantara, lama tinggal wisatawan mancanegara dan Load faktor angkutan perkotaan meningkat. Capaian dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan seperti tabel III-6 berikut:

Tabel III-6
Rincian Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-3 Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya,	-	30%	63,46%	212%	70%	91%
2.	Angka Melek huruf,	91,49 %	91,99 %	92,02 %	100,03%	95	96,86%
3.	Rata-rata lama sekolah,	9,2	9,6	9,21	95,94	12	77%

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya,	-	0%	0%		40%	0%
5.	Angka Harapan Hidup,	73,37	73,37	74	100,9	74,55	98,4%
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK) (Juta),	6,68 Jt	7 Jt	6,94 Jt	99,14	8,5 Jt	81,65 %
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah,	0,4524	0,453	0,4547	99,62	0,4481	98,55%
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan,	0,3194	0,298	0,3187	93,05	0,2878	90,30%
9.	Jumlah wisatawan nusantara,	2,162,422	2,113,314	2,602,074	123,13	2,437,614	106,75%
10.	Jumlah wisatawan mancanegara,	197,751	212,518	235,888	111,50	245,198	96,20%
11.	Lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	1,9	2	1,59	79,5	2,6	61,15%
12.	Lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,03	2,15	1,90	88,37	2,69	70,63%
13.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,	B	B	B	100	A	66,67%
14.	Opini pemeriksaan BPK,	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
15.	*Load factor* angkutan perkotaan meningkat,	30,66	34,57%	34,49%	99,77	42,57%	81,02%
16.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan,	-	3,14%	3,14%	100	15,72%	20,0%
17.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat,	45%	50%	63,25%	127%	90%	70,28%
	Rata-rata						**77%**

III.2.3.1 Indikator 1, Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya

Untuk tahun 2013, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang sangat baik, karena terealisasi jauh diatas target yang dicanangkan (212%). Capaian ini menyumbang sebanyak 70% dari target pada akhir RPJMD (2017).

Capaian ini juga selaras dengan posisi Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan dimana beragam budaya bertemu dan berinteraksi. Namun demikian, sebagai sebuah produk sosial yang dinamis, pertukaran ini justru memiliki peluang untuk menguatkan budaya lokal dan mengukuhkan identitas budaya yang tidak bersifat eksklusif

III.2.3.2 Indikator 2, Angka Melek Huruf

Tahun 2013, realisasi pencapaian sasaran angka melek huruf telah menunjukkan hasil yang positif. Realisasi kinerja tahun 2013 menunjukkan bahwa angka melek huruf telah melebihi target yang ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 92,02% dari target 91,99%, atau sebanyak 100,03%. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran kedua ini. Sedangkan bila dilihat dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun RPJMD, pencapaian ini telah mencapai 98,86% dari rencana kinerja tahun 2017.

III.2.3.3 Indikator 3, Rata-rata Lama Sekolah

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini menunjukkan bahwa capaian kinerjanya sangat baik, karena mencapai 95,94% dari target yang dirumuskan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah adalah 9,21 tahun, dibandingkan dengan target sebanyak 9,6 tahun. Pencapaian ini juga telah mencapai 77% dari rencana target kinerja pada akhir RPJMD pada tahun 2017 yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 12 tahun.

III.2.3.4 Indikator 4, Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasi Budaya

Indikator ke-4 ini belum ditentukan target kinerjanya pada tahun 2013, sehingga realisasinyapun belum ada (0) disebabkan adanya penyesuaian indikator kinerja lama pada tahapan RPJMD yang lama menjadi indikator kinerja baru disesuaikan dengan RPJMD 2012 – 2017 akan dihitung mulai tahun 2014.

III.2.3.5 Indikator 5, Angka Harapan Hidup

Sasaran peningkatan harapan hidup menunjukkan keberhasilan dimana pada tahun 2013, capaian kinerjanya melebihi target yang ditetapkan. Dari target 73.37 tahun, realisasi tahun 2013 menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk DIY mencapai 74 tahun atau 100,9% dari target kinerja, atau mencapai kinerja yang sangat baik. Dengan pencapaian ini pula, telah mencapai 98.4% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2017, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

III.2.3.6 Indikator 6, Pendapatan Perkapita Pertahun (ADHK) (Juta)

Berdasarkan data BPS, nilai PDRB per kapita DIY secara riil (atas dasar harga konstan 2000) tahun 2013 mencapai Rp 6,94 juta meningkat 3,78% dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp 6,68 juta. Secara kasar, angka ini mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk yang semakin meningkat. Dalam IKU Gubernur 2013, peningkatan pendapatan ditargetkan naik dari RP 6,68 juta per kapita per tahun menjadi Rp 7 juta per kapita per tahun.

Realisasi pencapaian nilai pendapatan sebesar Rp 6,94 juta per kapita per tahun, atau sebanyak 99.14% dari target yang dicanangkan. Ini menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik untuk tahun 2013. Selain itu, bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah menyumbang sebanyak 81,65% dari target akhir RPJMD untuk meningkatkan pendapatan sebanyak Rp 8.5 juta per kapita per tahun pada tahun 2017.

III.2.3.7 Indikator 7, Indek Ketimpangan Antar Wilayah

Pada tahun 2013, realisasi indeks ketimpangan wilayah mencapai angka 0,4547 atau 99,62% dibandingkan target yang ditetapkan. Dengan capaian ini, kinerja yang yang dicapai telah masuk kriteria sangat baik. Bila disandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini juga telah menyumbang sebanyak 98,55% dari target 0,4481 pada tahun 2017.

III.2.3.8 Indikator 8, Indeks Ketimpangan Pendapatan

Salah satu indikator yang menjadi penanda ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata.

Penurunan ketimpangan pendapatan yang berhasil dicapai tahun 2013 sudah mencapai 93,05% dari target, atau memiliki capaian kinerja **sangat baik**. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 90,30% dari target indeks ketimpangan pendapatan sebesar 0,2878.

III.2.3.9 Indikator 9, Jumlah Wisatawan Nusantara Meningkat

Capaian IKU tahun 2013 menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan nusantara jauh melebih target yang dipatok. Pada tahun 2013, realisasi jumlah wisatawan nusantara adalah sebanyak 2.602.074 wisatawan. Angka ini mencapai 123,13% dibandingkan target yang dipasang. Capaian ini juga telah melampaui target akhir RPJMD (106,75%) dari target sebanyak 2.437.614 wisatawan pada tahun 2017. Dengan capaian ini, kinerja pencapaian IKU tahun 2013 adalah **sangat baik**.

III.2.3.10 Indikator 10, Jumlah Wisatawan Mancanegara Meningkat

Capaian IKU tahun 2013 untuk peningkatan kunjungan wisatawan mancanegera menunjukkan bahwa realisasi kunjungan wisatawan mancanegara telah melebih target yang ditentukan. Pada tahun 2013, realisasi jumlah wisatawan mancanegara adalah

sebanyak 235.888 wisatawan. Angka ini mencapai 123,13% dibandingkan target yang dipasang sebesar 212.518 wisatawan. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian ini telah mencapai 96,20%., yang berarti bahwa kinerja pencapaian IKU tahun 2013 adalah **sangat baik**.

III.2.3.11 Indikator 11, Lama Tinggal Wisatawan Nusantara (hari)

Di tahun 2013, lama tinggal wisatawan nusantara ditargetkan sebanyak 2 hari per wisatawan nusantara. Target ini dipatok naik sebanyak 5% dibandingkan capaian tahun 2012. Realisasinya pada tahun 2013 menunjukkan capaian sebanyak 1,59 hari per wisatawan atau sebanyak 79,50% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 61,15% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 2,6 hari. Pencapaian ini bermakna kinerja baik untuk pencapaian sasaran 11 dalam IKU tahun 2013.

III.2.3.12 Indikator 12, Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara (hari)

Di tahun 2013, lama tinggal wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak 2.15 hari per wisatawan mancanegara. Target ini dipatok naik sebanyak 5.9% dibandingkan capaian tahun 2012. Realisasinya pada tahun 2013 menunjukkan capaian sebanyak 1,90 hari per wisatawan atau sebanyak 88,37% dibandingkan target. Capaian ini juga berarti 70,63% dibandingkan target pada akhir RPJMD yaitu sebanyak 2,69 hari. Pencapaian ini juga bermakna kinerja baik untuk pencapaian sasaran 12 dalam IKU tahun 2013.

III.2.3.13 Indikator 13, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Capain kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan adalah nilai B untuk akuntabilitas kinerja pemerintah, yang telah berhasil dicapai (100%), atau bernilai kinerja sangat baik. Dengan pencapaian ini, menyumbang 66,67% terhadap target akhir RPJMD yaitu mencapai nilai A pada tahun 2017. Sebagai catatan, kinerja ini adalah realisasi kinerja pemerintah daerah tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Kemenpan tahun 2013,

karena proses penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2013 sedang dalam proses.

III.2.3.14 Indikator 14, Opini Pemeriksaan BPK

Untuk sasaran ke-14 ini, realisasi atas target kinerja yang ditetapkan menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada tahun 2013, target kinerjanya adalah pemeriksanaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan hasilnya bisa mencapai target. Dengan status pencpaaian opini yang terbaik ini, maka kinerja sasaran ke-14 adalah sangat baik. Apabila terus dipertahankan, capaian opini WTP ini juga dapat memenuhi target pada akhir tahun RPJMD pada tahun 2017. Sebagai catatan, sebagaimana realisasi untuk nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan di sasaran ke-13, realisasi ini juga merupakan capaian kinerja Pemda DIY untuk tahun 2012 yang dikeluarkan BPK pada tahun 2013. Untuk hasil pemeriksaan atas kinerja tahun 2013, masih dalam proses ketika laporan ini disusun.

III.2.3.15 Indikator 15, *Load Factor* Angkutan Perkotaan Meningkat

Arah kebijakan yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajeman dan rekayasa lalu lintas guna mencapai load factor angkutan perkotaan dari 32,57% menjadi 42,57% dan peningkatan akses di pedesaan.

Realisasi tahun 2013, pencapaian IKU menunjukkan telah berhasil dicapainya 99,77% dari target kinerja atau memiiliki pencapaian sangat baik. Dari load factor yang ditargetkan sebanyak 34.57%, realisasinya menunjukkan capaian sebanyak 34.49%. Pencapaian ini juga berarti mencapai 81,02% dari target akhir RPJMD pada tahun 2017.

III.2.3.16 Indikator 16, Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan

Untuk kualitas lingkungan penghitungannya digunakan indikator peningkatan kualitas udara ambien dan peningkatan kualitas air sungai.

Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditargetkan dalam IKU Gubernur 2013 telah menunjukkan capaian yang positif. Dari target sebanyak 3.14%, capaian tahun 2013 menunjukkan realisasi dalam jumlah yang sama (100%). Capaian ini juga menjadikan target capaian pada akhir tahun RPJMD terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2017. Dengan pencapaian ini, kinerja DIY untuk sasaran ke 16 pada tahun 2013 adalah memenuhi kriteria sangat baik.

III.2.3.17 Indikator 17, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi Meningkat

Dari target kinerja untuk sasaran pemanfaatan ruang, pencapaian untuk tahun 2013 menunjukkan hasil yang positif. Dari target kesesuaian pemanfaatan ruag terhadap RTRW kab/kota dan RTRW provinsi yang meningkat sebanyak 50%, capaiannya adalah sebanyak 63,25%. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang. Dibandingkna dengan target akhir RPJMD, capaian ini berarti 70,28% dari target kinerja akhir RPJMD ssebesar 90%.

Capaian ini menjadikan kinerja untuk IKU ke-17 untuk DIY tahun 2013 ini masuk dalam kriteria **sangat baik**.

III.2.3.18 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Permasalahan secara umum dalam fungsi pengendalian meliputi

1. Belum maksimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
2. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran.

3. Belum optimalnya koordinasi dalam penyusunan rencana pembangunan baik antar sektor maupun antar daerah (kabupaten/kota), yang mengakibatkan ketidak sinkronan perencanaan pembangunan.

Sedangkan permasalahan khusus yang terkait belum tercapainya target dari setiap indikator antara lain :

1. Masih terbatasnya akses pelayanan publik untuk masyarakat perdesaan
2. Masih belum kuatnya sinergi antara upaya peningkatan pendapatan masyarakat yang dilakukan pemerintah dengan upaya yang dilakukan oleh pihak lain termasuk pelibatan pihak pemodal terkait dengan kebutuhan masyarakat lokal.
3. Belum optimanya pengembangan berbagai daya tarik wisata baru dan pemeliharaan berbagai daya tarik wisata yang sudah ada, serta kurang intensifnya pengembangan jejaring, kerjasama dan koordinasi yang sinergis (keterpaduan) antar pelaku pariwisata (stakeholder) terutama pemberdayaan/keterlibatan masyarakat di sekitar daya tarik wisata.
4. Pemeliharaan bangunan cagar budaya masih belum terkelola dengan baik. Keunikan, keindahan, kelangkaan Banguann Cagar Budaya acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya.
5. Banyaknya angkutan perkotaan reguler *non buy the service* yang tidak melayani masyarakat baik dari sisi jam layanan yang tidak menentu maupun rute layanan yang dibiarkan kosong menyebabkan *load factor* angkutan perkotaan yang tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, selain itu masyarakat yang masih enggan untuk menggunakan angkutan umum, menjadikan

pergerakan lalu lintas di Perkotaan Yogyakarta masih didominasi oleh kendaraan pribadi

B. Solusi:

1. Bidang pengendalian perlu meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan sebagai *feedback* bagi perencanaan pembangunan daerah selanjutnya.
2. Bidang Perencanaan perlu mengoptimalkan fungsi perencanaan program dan anggaran dengan peningkatan koordinasi antara institusi perencana dengan institusi penganggaran serta mengintegrasikan proses politik sejak awal dan menyinkronkan waktu reses DPRD dengan tatakala waktu perencanaan dan penganggaran.
3. Bidang-bidang Perencanaan Sektor (Ekonomi, Kesra, pemerintahan dan Sarpras) perlu meningkatakan komunikasi, koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama antar daerah dan antar instansi dalam penyusunan perencanaan dan strategi yang tepat untuk memfokuskan program dan kegiatan yang dapat mendorong tercapainya target-target pembangunan.

Gambar III-2
Rapat Koordinasi Pengendalian
"Mengoptimalkan Realisasi dan Kualitas Belanja Tahun 2013"

Gambar III-3
Rapat Koordinasi Pengendalian
"Mengoptimalkan Realisasi dan Kualitas Belanja Tahun 2013"

III.2.4 Sasaran Data Perencanaan yang Aktual dan Valid

Tolok ukur capaian sasaran 4 (Data perencanaan yang aktual dan valid) mempunyai satu indikator yaitu Persentase kelengkapan data perencanaan tersedia, Formula yang digunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran persentase data perencanaan yang tersedia adalah sebagai berikut:

"Data yang terisi/jumlah data SIPDx100%"

Data perencanaan dikategorikan ke dalam delapan kelompok data, tiga puluh dua jenis data, dan 2760 elemen data, Dengan formula yang digunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran maka didapatkan besar capaian indikator sasaran sebagai berikut:

$$\frac{2550}{2760} x\ 100\% = 92{,}39\%$$

Dari perhitungan diatas jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 maka tahun 2013 capaian indikator kinerja untuk kelengkapan data perencanaan yang tesedia mengalami kenaikan yaitu sebesar 1,83 %, akan tetapi jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk tahun 2013 maka capaian indikator kinerja tidak tercapai yaitu masih dibawah target sebesar

1,61 % hal tersebut dikarenakan ada beberapa kendala atau permasalahan yang dihadapi, Untuk lebih jelasnya perhitungan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel III,4 berikut:

Tabel III-7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-4 Tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase Kelengkapan data perencanaan yang tersedia	90,56 %	94 %	92,39 %	98 %	100%	98 %

Pada tahun 2013, capaian realisasi indikator kinerja sasaran persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia adalah sebesar 92,39% masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 94%, Hal tersebut diantaranya disebabkan adanya penambahan elemen data dari tahun sebelumnya sebanyak 1674 bertambah menjadi 2760 elemen data sehingga beberapa data belum dapat terpenuhi keterisiannya pada tahun 2013,

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian realisasi tahun 2013 mengalami peningkatan, Pada tahun 2012, capaian realisasi hanya sebesar 90,56% dimana dari jumlah elemen data sebanyak 1674 terisi sebanyak 1516 elemen data,

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode Renstra (tahun 2017), capaian realisasi tahun 2013 tersebut baru mencapai 98% yang berarti masih diperlukan beberapa upaya untuk mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%,

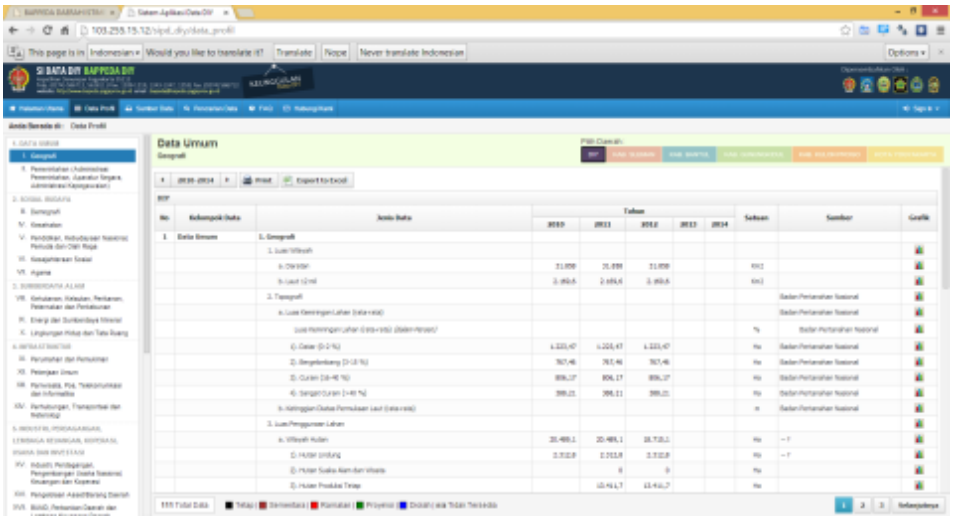

Gambar III-4
Sistem Informasi Profil Daerah

III.2.4.1 Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan:

1. Data Perencanaan yang harus disediakan mencakup data SIPD, Permendagri 54/2010 dan data tambahan dari SKPD dimana data SIPD tersebut menjadi format awal penyusunan Data Perencanaan, Dalam perkembangannya, data SIPD yang diakomodir dalam Data Perencanaan adalah data yang telah disesuaikan dengan kondisi daerah, Pada tahun 2013 SIPD mengalami perubahan/penambahan elemen data sehingga Data Perencanaan pun mengalami perubahan/penambahan elemen data, namun beberapa SKPD belum bisa menyediakan pada tahun yang bersangkutan;
2. Pergantian anggota/personil tim pengumpul dan updating data memerlukan penyesuaian;
3. Beberapa anggota tim pengumpul dan updating data tidak melaksanakan tugas dengan baik, yaitu kesulitan dalam mengumpulkan data di SKPDnya dengan alasan data berada di masing-masing bidang di SKPD;
4. Perbedaan istilah dan satuan data antara yang diminta dan yang tersedia di SKPD.

B. Solusi:

1. Subbid Statistik menyiapkan bahan koordinasi dengan SKPD pengampu terkait dengan perubahan/penambahan elemen data sehingga pada tahun 2014 keterisian data dapat terpenuhi;
2. Personil tim pengumpul dan updating data yang dikirimkan SKPD menguasai dan berkompeten terhadap data SKPD;
3. Perlunya koordinasi internal SKPD berkaitan dengan pengumpulan data serta surat teguran tertulis dari Pemda DIY;
4. Penyamaan persepsi tentang istilah dan satuan data.

III.2.5 Sasaran Meningkatkan Aksesibilitas Terhadap Data

Tolok ukur capaian sasaran 5 (Persentase Data Perencanaan yang dapat diakses) mempunyai satu indikator yaitu Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses, Formula yang digunakan untuk menghitung capaian indikator sasaran persentase data perencanaan yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

"Jumlah data/informasi yang dapat diakses melalui website Bappeda /jumlah data/informasi yang tersedia di Bappeda x 100 %"

Indikator persentase data perencanaan pembangunan dikategorikan ke dalam data/informasi mentah dan data/informasi olahan, Data/informasi perencanaan pembangunan dan laporan pelaksanaan dapat diakses baik dalam bentuk *digital* maupun *hardcopy,* Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi ada 98 jenis data/informasi yang dihasilkan BAPPEDA DIY, Pada tahun 2013 Bappeda DIY telah mempublikasikan 70 macam informasi perencanaan pembangunan,

Formula yang dipakai dalam perhitungan capaian indikator maka dapat dihitung besar capaian indikator sasaran sebagai berikut:

$$\frac{70}{98} x\ 100\% = 71{,}42\ \%$$

Dari perhitungan di atas, jika dibandingkan dengan tahun 2012 maka ada kenaikan capaian indikator kinerja sebesar 21,42%, sedangkan untuk capaian

tahun 2013 jika dibandingkan dengan target maka capaian indikator kinerja lebih besar 11,42 %, Untuk lebih jelasnya perhitungan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel III-4 berikut:

Tabel III-8
Capaian Indikator Kinerja Sasaran ke-5 tahun 2013

No	Indikator	Capaian 2012	2013			Target Akhir Renstra (2017)	Capaian s/d 2013 terhadap 2017 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses		60 %	71,24 %	119,04 %	100 %	71,24 %

Gambar III-5
Halaman Download Data/Informasi Perencanaan pada Website BAPPEDA DIY

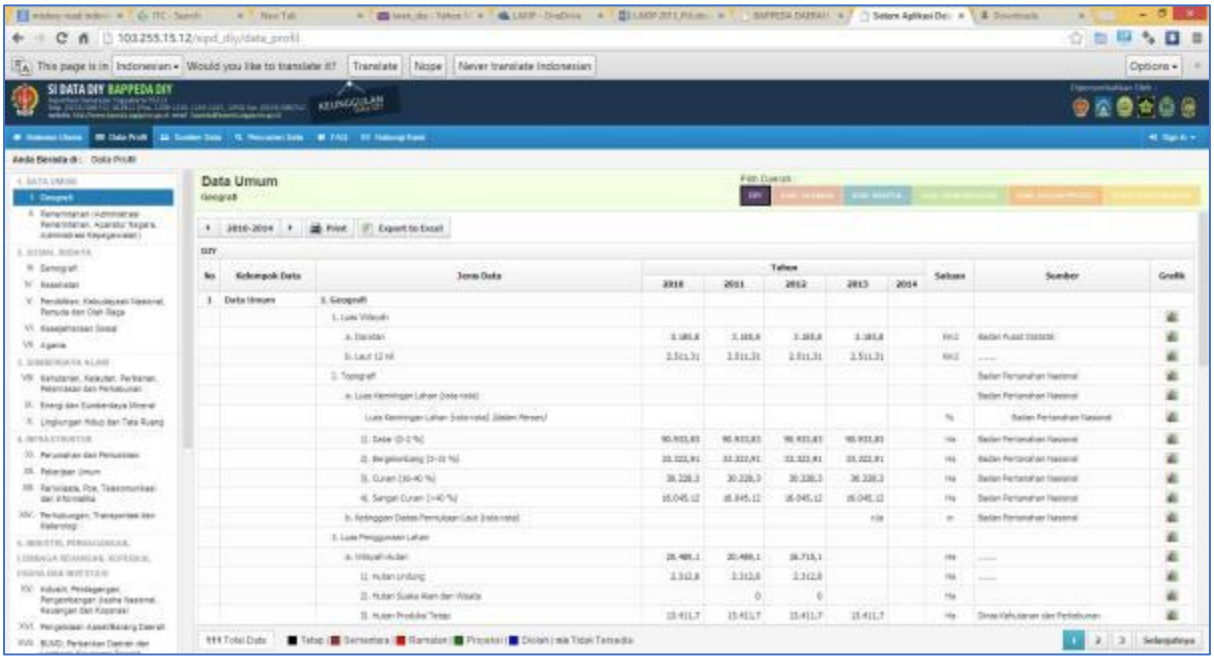

Gambar III-6
Halaman Utama Sistem Informasi Profil Daerah

III.2.5.1 Permasalahan Dan Solusi

A. Permasalahan:

1. Pengumpulan data/informasi dari bidang-bidang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sehingga proses uploading data ke website terlambat;
2. Belum ada format data/informasi yang sama antar bidang sehingga memerlukan waktu untuk upload data/informasi;
3. Belum ada personil tetap untuk mengupdate web di masing-masing bidang.

B. Solusi:

1. Koordinasi secara intensif ke masing-masing bidang terkait dengan data/informasi yang akan di publikasikan ke website;
2. Subbag Program Data TI menyiapkan format isian data/informasi yang akan dipublikasikan ke website;
3. Subbag Program Data TI menyiapkan pembentukan tim pengelola website yang bertugas mengupdate data/informasi di masing-masing bidang.

III.3 Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2013 sebesar 76 % dari total anggaran yang dialokasikan, Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 76,98%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 88,18%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-empat (97%), Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran ke-dua (62 %),

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2013 telah mencukupi,

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel III-9 berikut:

Tabel III-9
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2013

NO	Sasaran	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
1.	Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat	RP 2,181,846,900,-	Rp 1,839,476,100,-	84 %
2.	Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat	Rp 10,562,502,190,-	Rp 6,600,473,190,-	65,42 %
3.	Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya	Rp 2,305,893,030,-	Rp 1,807,845,645,-	44,34 %
4.	Data perencanaan yang aktual dan valid	Rp 1,426,177,380,-	Rp 1,382,404,050,-	97 %
5.	Meningkatkan aksesibilitas terhadap data	Rp 931,930,500,-	Rp 872,388,500,-	94 %
Jumlah		**Rp 17,404,816,485,-**	Rp 12,502,585,485,-	76,95 %
Belanja Langsung Pendukung		**Rp 5,206,621,300,-**		
Total Belanja Langsung		**Rp 22,614,437,785,-**		

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BAPPEDA DIY disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2013 serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance.*

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak lima indikator,

Penyelenggaraan kegiatan di BAPPEDA DIY pada Tahun Anggaran 2013 merupakan tahapan dari Rencana Strategis BAPPEDA DIY Tahun 2012-2017, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak,

Hasil laporan akuntabilitas kinerja BAPPEDA DIY tahun 2013 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana;
2. Dari lima indikator sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 2 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu:
   a. indikator sasaran strategis konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya sebesar 3% diatas target;
   b. indikator sasaran strategis meningkatkan aksesibilitas terhadap data sebesar 11,24% diatas target.

3. Sementara itu sebanyak tiga indikator yaitu Keterpaduan program/ kegiatan pembangunan meningkat, Integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat, Data perencanaan yang aktual dan valid tidak tercapai seperti dijelaskan berikut:
   a. Sasaran strategis keterpaduaan program deviasi yang terjadi sebesar 2,66% di atas target;
   b. untuk sasaran strategis integrasi program pembangunan sektoral dan kewilayahan meningkat deviasi yang terjadi sebesar 2,66% diatas target yang ditetapkan;
   c. sedangkan untuk sasaran strategis data perencanaan yang aktual dan valid sebesar 1,61% dibawah target.

Tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia sebesar 118,73%. Sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan dan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan. perkonomian. kesajahteraan rakyat dan sarana prasarana sebesar 88,99%.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LAKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningka tan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel;
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di instansi pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK),

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2013 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.